

MODERASI BERAGAMA KERAGAMAN INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

(RELIGIOUS MODERATION OF INDONESIAN DIVERSITY IN THE FRAMEWORK OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

Abdul Manap
Universitas Jayabaya
email: hamanap.joyo@gmail.com

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

Kata kunci: *Multikultural, Moderasi beragama, Penyuluh agama.*

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic Indonesia is multicultural country. It's diversity includes differences in culture, religion, race, language, ethnicity, tradition and others. In a such multicultural society, there are frequent tensions and conflicts among cultural groups and have impacts on harmony in life. The purpose of this paper is to discuss the diversity of Indonesian culture, its religious moderation in the diversity and role of religious educators in realizing Indonesian national peace. The method used is a library research. The conclusion of this study is that multicultural life requires multicultural understanding and awareness that respects diversity, and willingness to interact with anyone fairly. A religious attitude of moderation is needed in the form of recognition of the existence of other parties, being tolerant, respecting differences of opinion and not forcing the will through violence. The role of the government, community leaders, and religious guidance is needed to socialize, develop religious moderation to the community for the sake of the realization of harmony and peace.

Keywords: *Multicultural, Religious moderation, Religious guidance.*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis/suku, bahasa, agama, budaya, status sosial. Keragaman dapat menjadi "integrating force" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup.

Keragaman atau multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia.

Benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka diantara suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008).

Di masyarakat multikultural interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga bagian wilayah, yaitu: *affiliation* (kerja sama), *Cooperation and Resolution Conflic* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang). (Curtis, 1988).

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia

sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan Bangsa Indonesia



Gambar 1. Moderasi Beragama Dalam Bingkai NKRI. (Abdul Manap, 2022)

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktulama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks.

Budaya kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Konflik dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, jika keberadaannya dipersepsikan negatif dan diselesaikan dengan cara kompetitif. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan kedamaian di masyarakat.

Bagi para penyuluh agama sebagai pelayan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan petugas penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi menghadapi perbedaan, serta sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Penyuluh perlu meningkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, petugas penyuluh diharapkan dapat menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan harmoni kelompok binaannya.

Dengan situasi meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam masyarakat, maka para penyuluh dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas lagi, sehingga perlu memahami multikultural sehingga dapat lebih efektif dalam pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian artikel adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman sosial budaya, moderasi beragama dan peran yang dimainkan para penyuluh agama untuk membangun keharmonisan beragama di masyarakat Indonesia yang multikultur. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana moderasi dalam keragaman bangsa Indonesia. Sedangkan manfaatnya tersedianya kajian serta referensi pengetahuan tentang keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi keragaman yang ada

pada bangsa Indonesia dan peran penyuluh agama dalam kehidupan keragaman bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya mengenai moderasi beragama dilakukan oleh Agus Ahmadi (2021), dengan judul “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia” di Kota Surabaya, Jawa Timur. Permasalahan dalam penelitian tentang Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Hasil penelitian adalah: 1) Perbedaan dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. 2) Pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan arif dan bijak. 3) Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri bagi Indonesia jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Mohammad Abror (2020) yang berjudul “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi” di Bengkalis, Kepulauan Riau. Permasalahan penelitian yang diangkat adalah bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus dihargai, dengan saling mengenal maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka.

Hasil penelitiannya adalah: 1) Multikultural memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain dalam toleransi, perdamaian dan keadilan. Toleransi, sebagaimana Al-Qur'an Surat Al Hujuraat: 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling

mengenal. Perdamaian. Islam berasal dari akar kata "al-Salam" yang berarti perdamaian. 2) Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. 3) Multikultural menekankan umat berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain.

Al-Qur'an (Surat al-Maidah[5]:8) "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil". Ayat ini mengajak untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang atau kelompok yang memusuhi kita. Berlaku adil maksudnya hendaklah kita tetap berlaku "obyektif" terhadap mereka. Jika prinsip ini menjadi ruh kehidupan kita, maka kehidupan multikultural dapat terwujud.

Kata moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah[2]:143. Kata *al-Wasath* bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam Moderasi beragama kedudukannya sama walau peribadatnya beda.

Gambar 2. Tempat Ibadah Umat Islam (Arie Saksono, 2008)



Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin (Darlis, 2017).

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling membentur antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*) serta tidak mempertentangkan.

Agama Hindu di Indonesia dianggap sebagai keyakinan yang sangat moderat. Dalam tulisan ini penulis gambarkan lambang tempat ibadahnya agama Hindu.

Gambar 3. Tempat Ibadah Umat Hindu (Depag, 2019)



Dalam konteks beragama, untuk memahami teks agama saat ini jangan sampai terpolarisasi pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem.

Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteksnya. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal,

terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya. Oleh karenanya yang demikian ini tidak bijak dalam menjalankan nilai-nilai tersebut secara berlebihan.

Gambar 4. Tempat Ibadah Umat Budha (Aloysius Lewokeda, 2017)



Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama.

Berikut gambar agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

Gambar 5. Tempat Ibadah Umat Katolik (Rendy Nugroho, 2014)



Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif, Hindu, Khatolik, Protestan, Budha dan Konghuchu adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan perpepsi tentang ajarannya.

Gambar 6. Tempat Ibadah Kristen Protestan (GPIB Bukit Benuas, 2019)

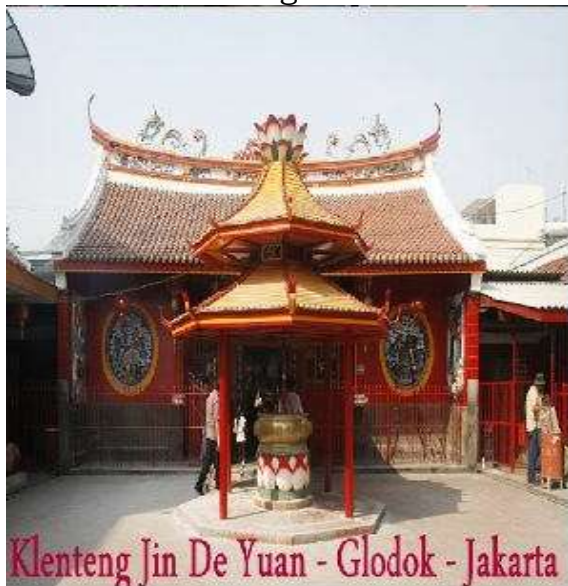


Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap 'tenggang rasa', sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Agama Budha di Indonesia sama moderatnya dan sangat mewarisi budaya leluhur. Penulis disini menggambarkan tempat ibadahnya di atas tersebut.

Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 ini sebagai "Tahun Moderasi Internasional" (*The International Year of Moderation*). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan

komitmen Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi beragama.

Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi berbagai masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia. Berikut ini gambar tempat ibadah umat Konghuchu.



Gambar 7. Tempat Ibadah Umat Konghuchu (Gunawan Kartapranata, 2008)

Penyuluh agama merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluh Agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pokok agama maupun pesan-pesan program pemerintah.

Peran penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal

sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya peran penyuluh agama memiliki potensi strategis untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat.

Para penyuluh memposisikan diri ikut ambil bagian dalam moderasi beragama yang baik dalam menghadirkan kedamaian beragama pada setiap kegiatan penyuluhannya. Dapat dibangun masyarakat yang toleran, damai dan perlu dioptimalkan oleh para penyuluh melalui kegiatan atau tahapan: melakukan perencanaan kegiatan, mengorganisir kegiatan, melaksanakan serta melakukan *monitoring* untuk evaluasi program moderasi beragama.

3. METODOLOGI

Pada metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan.

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan juga kritis tentang moderasi

beragama dalam bingkai NKRI. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku-buku yang secara khusus membahas tentang moderasi beragama seperti buku moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama RI serta sumber sekunder berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini semua dilakukan di Jakarta.

4. HASIL PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah terkenal dengan keragaman budaya dan dengan sifat kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi masyarakat dan sebagainya sehingga berpredikat sebagai bangsa yang multikultural.

Multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan yang mencerminkan kemajemukan. Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga negara dalam lingkup negara/bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama (Nugraha, 2008), dan multikulturalisme normatif itulah tampaknya yang dikembangkan di Indonesia.

Masyarakat multikultural terdiri dari masyarakat negara, bangsa, daerah, atau lokasi geografis seperti kota atau kampung, yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar

individu di masyarakat bersifat toleran dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang ada pada tiap entitas budayanya.

Dalam keragaman bangsa Indonesia, secara historis dan sosiologis agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, namun jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya kabupaten/kota maka terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut.

Indonesia sebagai sebuah Negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama, oleh karena itu, disamping bekerja sama dengan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikultural, petugas penyuluh agama sebaiknya juga mulai memikirkan memberikan informasi mengenai multikultural kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun kesadaran multikultural.

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara hidup yang khas. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu ini

meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian.

Fenomena kehidupan damai dan harmonis tersebut ternyata tidak selalu terjadi di Indonesia, masyarakat multikultural di Indonesia tidak selamanya dapat hidup berdampingan sebagaimana yang diharapkan. Ketegangan dan konflik sering muncul pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras dan tradisi yang berbeda, yang pada saat tertentu multikultur tersebut menjadi persoalan besar bagi keharmonisan dan kelangsungan bangsa. Oleh karena itu, perlu perjuangan terus menerus untuk mewujudkannya.

Berbagai kejadian dan tragedi ketidakharmonisan masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurangarifan dalam mengelola berbagai keberagaman masyarakat, yang menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan, yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia.

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat, maka perlu pendekatan kultural dengan memperkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang memiliki pesan-pesan luhur tentang kedamaian. Namun, solusi dengan pendekatan tersebut juga tidak selalu berhasil digunakan tanpa dibarengi dengan paham keagamaan yang tepat dan bijak, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Pesan-pesan agama menjadi sesuatu yang mendasar

menjadi pijakan masyarakat dalam bertingkah laku.

Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan terdapat tiga pendekatan edukatif yang umum diterapkan untuk mengatasi konflik pelajar, yaitu: [1] pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, [2] latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, dan [3] mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya (Gerstein & Moeschberger, 2003). Model penyelesaian konflik tersebut efektif, di antaranya dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, lebih bersikap prososial, dan dapat menghindari sebagai korban dari tindak kekerasan (Laursen, Finkelstein, Betts, 2001).

Sebagai masyarakat yang fanatik dengan keyakinannya, maka pendekatan keagamaan menjadi pilihan untuk membangun keharmonisan umat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama yang damai, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural.

Moderasi beragama tidak berarti mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak

yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang harus kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi kita, sahabat, para ulama termasuk ulama-ulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa.

Dalam lingkup masing-masing agama, juga terdapat keragaman faham agama. (Schwartz, 2007) menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosio-kultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara sosiokultural, pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat.

Demikian juga pada kelompok kristen, terdapat juga beberapa kelompok. Mereka yang menerima pikiran-pikiran baru dalam berteologi ini disebut kelompok modernist dan atau liberal. Tetapi tidak semua gereja dan para pemimpin gereja, teolog dan umat Kristen menerima teori evolusi itu. Mereka menentang keras ajaran itu dengan membentengi dirinya dengan berbagai argumen Alkitabiah. Mereka yang menentang teori evolusi berargumen bahwa gereja harus loyal kepada "dasar-dasar iman Protestan", sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Untuk membentengi diri dari terpaan modernisme dan

teori evolusionisme itu, maka para pemimpin gereja dari berbagai kelompok konservatif dan evangelikal bersatu menerbitkan sebuah buku berjudul *The Fundamentals : A Testimony to the Truth*, yang terbit tahun 1910.

Masing-masing agama memiliki kelompok fundamental yang melihat kelompoknya yang paling benar. Latar belakang kelahiran fundamentalisme sebagaimana dibuat teolog dan ahli sejarah, George C. Marsden, yang mengatakan fundamentalisme adalah "*angry evangelical*" adalah sangat tepat dalam konteks ini.

Disamping sesama agama terdapat sikap fundamentalis, ternyata harus diakui bahwa dalam kehidupan agama-agama yang beragam juga terdapat dilema yang serius yaitu ketika anggota kelompok agama berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Dalam komunitas agama, hampir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Jika ini terjadi, maka ketegangan akan tercipta.

Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Islam pembawa kedamaian, nilai-nilai Islam sanga mendukung kedamaian, maka selayaknyalah umat Islam yang *rohmatan lil alamin* menjadi penggerak kedamaian dan pengayom masyarakat. Disini terdapat kesadaran bahwa dalam keberagaman terdapat beragam keragaman seperti perbedaan dan keragaman faham agama. Dalam mengejawantahkan keagamaannya, masing masing memiliki kultur, bahasa, adat, dan kewajiban yang sama-sama dimiliki dan perlu

dihormati. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kepada sikap keterbukaan, toleran, dan fleksibel dalam bertingkah.

Agama Islam yang datang ke Indonesia memang tidak dalam ruang yang hampa, datang langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia, wajah Islam Indonesia seperti saat ini adalah cerminan dari hasil interaksi Islam dengan budaya Indonesia yang kemudian melahirkan Islam dengan tradisi NU dan Muhammadiyah.

Dengan demikian perlu diupayakan adanya peningkatan kesadaran multikultural pada bangsa kita, dan selanjutnya akan memupuk sikap moderasi beragama. Hal ini perlu dilakukan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia baik oleh pemerintah, para tokoh-tokoh bangsa, dan para penyuluh agama yang memang ditugasi memberikan penyuluhan agama.

Bagaimana sikap moderat tersebut ditumbuhkembangkan di masyarakat kita? Setidaknya perlu menggunakan pendekatan agama dan pendekatan multikultural. Pendekatan agama didahulukan, karena keyakinan agama sangat dominan dalam kehidupan seseorang.

Moderasi harus dipahami ditumbuh-kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka, seperti agama-agama di Indonesia secara moderat.

Sikap moderat dalam beragama berasal dari konsep "tawasuth", karena dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakter moderat. Kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau bersikap ekstrim (*ghuluw*). Allah memerintahkan bersikap "tawazun" (seimbang). Dalam QS Ar-Rahman: "Dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan. Agar kamu jangan melampaui keseimbangan". (Darlis, 2017).

Dalam Risalah Jakarta disepakati bahwa konservatisme adalah sesuatu yang lumrah dalam beragama karena pemeluk agama berkewajiban melihara keyakinan dan praktek keagamaannya.

Namun yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (*ultra-conservatism*). Dalam Islam, sikap tidak berlebih-lebihan tersebut berangkat dari konsep *al wasathiyah* yang dapat bermakna seimbang.

Dalam konteks Indonesia, *al wasathiyah* dapat meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip *maqashid* tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Syari'ah*).

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia.

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini

sebagai *sunnatullah* dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda cara pandangan.

Moderasi dalam Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu dapat menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya dalam perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman (Fahrudin, 2019).

Pendekatan kultural juga dapat diterapkan. Kearifan lokal berasal dari dua kata : arif berarti cerdik, pandai dan bijaksana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan awalan "ke" dan akhiran "an" maka berarti kearifan atau kebijaksanaan yang tumbuh yang berbeda antara satu dengan lainnya perlu diperhatikan.

Menurut teori strukturisasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk pola struktur dalam masyarakat. Aktifitas penyuluh agama melalui praktik atau tindakan yang berulang-ulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor. Penyuluh agama sebagai agen mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka dalam menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien.

Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragamanya tersebut, penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai: 1]informatif dan edukatif; penyuluh agama berperan memosisikan sebagai pendakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama 2]Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. 3]Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas penting untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya (Amirulloh, 2016).

Untuk menjalankan fungsi penyuluh agama secara optimal, maka dalam naskah akademik (Kementerian Agama RI, 2015) disebutkan bahwa pokok-pokok kemampuan yang diperlukan, yaitu: 1) Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsi tersebut dilakukan misalnya isu demografis, ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan lain-lain) dan kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program, perencanaan dan penyerahan atau disebut Proses aksi sosial 2) Kesadaran, komitmen nyata dan kemampuan termasuk ada rasa memiliki terhadap berbagai budaya yang berbeda, asumsi-asumsi, norma-norma, kepercayaan dan

nilai-nilai multi budaya, atau Keanekaragaman dalam budaya. 3) Kemampuan merencanakan, mendesain dan penerapan, mengevaluasi, menghitung serta menjual program penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup sasaran penyuluhan atau Pemograman bidang penyuluhan. 4) Kemampuan untuk mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai respon terbaik terhadap kebutuhan dari individu dan masyarakat binaan (Perikatan). 5) Menguasai keterampilan dan berkomunikasi baik lisan dan tulisan, penerapan teknologi dan metode-metode penyuluhan untuk mendukung program penyuluhan dalam memandu setiap perubahan perilaku pada sasaran penyuluhan (Penyampaian pendidikan dan informasi). 6) Kemampuan interaksi yang efektif dengan individu dan kelompok binaan yang beragam untuk mewujudkan kerjasama, membangun jaringan dan sistem dinamis (Hubungan antara pribadi). 7) Pemahaman sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (Pengetahuan tentang organisasi). 8) Kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok-kelompok binaan yang berbeda secara positif, atau pengelolaan organisasi penyuluh. 9) Kemampuan untuk menetapkan struktur, mengorganisir proses, pengembangan, dan memonitor sumber daya serta memimpin perubahan untuk memperoleh hasil-hasil penyuluhan secara efektif dan efisien atau fungsi kepemimpinan. 10) Kemampuan berperagaan perilaku yang mencerminkan tingginya tingkat kinerja penyuluh, mencerminkan etika kerja yang kuat, komitmen pendidikan berkesinambungan

sesuai visi, misi dan sasaran penyuluhan dalam rangka usaha meningkatkan efektifitas individu dan organisasi (Profesionalisme).

Kearifan lokal bermakna bijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, pepatah pepitih dan semboyan hidup' juga perlu diperhatikan, sehingga menjadi modal dalam membangun keharmonisan bersama. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal atau *local wisdom*, maka beragam bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas perlu juga diperhatikan.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa wacana kearifan lokal juga bersandingan dengan wacana perubahan, modernisasi dan relevansinya. Hal ini karena kearifan lokal terkait dengan ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural juga selalu dituntut untuk mampu merespon perubahan-perubahan masyarakat.

Untuk itu, upaya yang dilakukan sesuai pendapat (Mas'ud, 2018) perlunya cara mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Disinilah dipertemukan komponen agama dan budaya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga tidak ada lagi persoalan antara ajaran agama dan adat. Kearifan Lokal inilah yang

menangkal ketegangan dalam beragama menjadi bijak.

5. KESIMPULAN

Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi, bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan.

Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkan kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Wawasan multibudaya bagi masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan penting dalam membangun keharmonisan bangsa, sehingga perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Moderasi beragama perlu ditumbuhkan melalui sarasehan, pengajian, maupun dialog kebangsaan, sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan bersama penyuluh agama dapat menjadi penggerak gerakan moderasi beragama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Pimpinan STAH Dharma Sentana, Sulawesi Tengah
2. Pengelola dan Tim Redaksi Jurnal Widya Genitri
3. FEB Universitas Jayabaya

4. Puslitbang dan Pusdiklat Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Tim buku-buku referensi terkait dengan materi
6. Istri dan anak yang meng-support secara lahir dan batin.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Agus. (2021). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. Surabaya: Balai Diklat Keagamaan.
- Amin, R. (2014). Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam. Jakarta: Al- Qalam.
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255.
- Fahrudin. (2019). Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. Jakarta: Republika.
- GPIB Bukit Benuas. (2019). Gereja Protestan. Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://www.gpihbukitbenuas.org/>.
- Kartapranata, G. (2008). Klenteng Jin De Yuan, Glodok, Jakarta. Diakses pada 20 Oktober 2022 dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Klenteng_Jin_De_Yuan,_Glodok,_Jakarta.jpg
- Kementerian Agama RI. (2019b). Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta: Kemenag RI.

- Kinloch, G. C. (2015). *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lewokeda, A. (2017). *Vihara Buddha Dharma & 8 Posat*. Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://kupang.antaranews.com/berita/1449/gmit-dukung-pembangunan-wihara>
- Manap, Abdul. (2022). *Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Bingkai NKRI*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Mas'ud, A. (2018). *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*. Jakarta: Kompas. Nugraha. (2008). *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung.
- Nugrogo, R. (2014). *Gereja Katedral Jakarta*. Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://merahputih.com/post/read/asal-usul-gereja-katedral-jakarta>.
- Options, N. L. (2007). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Y. (2013). *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*. Beirut: al-Muassasah al-Risalah.
- Rakhmat, C. (2018). *Paradigma Konseling Berbasis Budaya: Metateori yang membumikan Konseling dalam konteks Budaya*. Pidato pengukuhan Guru Besar pada FIP UPI. Bandung : UPI.
- Schwartz, S. (2017). *Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*. Jakarta: Belantika.
- Sutrisno, H. (2000). *Metodologi Research III*. Andi Offset, Yogyakarta. Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wicaksono, A. (2008). *Masjid Istiqlal Jakarta*. Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://ariesaksono.wordpress.com/2008/01/15/masjid-istiqlal-jakarta/>.